

Pelaksanaan uji kompetensi skema *junior administrative assistant* (JAA) di LSP-P1 Universitas Sebelas Maret

Dian Azizah Nur Aini*, Tri Murwaningsih

Pendidikan Administrasi Perkantoran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: dianazizahnuraini1@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tujuan pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS, (2) pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS, (3) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS, (4) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Validitas data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS (a) mengukur sejauh mana mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan mereka dalam dunia kerja nanti, serta (b) mendukung pencapaian profil PAP yaitu sebagai praktisi di bidang administrasi perkantoran. (2) pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. (3) hambatan dalam pelaksanaan: (a) hambatan yang dialami dalam pelaksanaan uji kompetensi ini adalah kurangnya persiapan mahasiswa, (b) fasilitas yang kurang optimal. (4) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan (a) upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi yang intensif kepada mahasiswa, serta (b) meningkatkan sarana dan prasarana.

Kata kunci : asesor; sertifikasi; TUK

Abstract

This research aims to determine (1) the objectives of the JAA competency test implementation at LSP-P1 UNS, (2) the execution of the JAA competency test at LSP-P1 UNS, (3) the challenges faced during the implementation of the JAA competency test at LSP-P1 UNS, and (4) the efforts made to address these challenges. This study employs a descriptive qualitative approach with a case study type. Sampling techniques include purposive sampling and snowball sampling. Data collection methods involve interviews, observations, and document analysis. Data validity is ensured through source and technique triangulation. Data analysis uses interactive analysis. The research findings are as follows: (1) The implementation of the JAA competency test at LSP-P1 UNS aims to (a) measure the extent to which students can

* Corresponding author

Citation in APA style: Aini, D.A.N., Murwaningsih, T. (2024). Pelaksanaan uji kompetensi skema junior administrative assistant (JAA) di LSP-P1 Universitas Sebelas Maret. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 8(5), 521-527. <https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v8i5.90253>

apply their knowledge and skills in the workplace, and (b) support the achievement of the PAP profile as practitioners in office administration. (2) The implementation process includes preparation, execution, and evaluation stages. (3) Challenges encountered include: (a) insufficient student preparation, and (b) suboptimal facilities. (4) Efforts to overcome these challenges involve (a) intensive socialization to students, and (b) improving facilities and infrastructure.

Keywords : assessor; certification; TUK

Received July 13, 2024; Revised August 25, 2024; Accepted August 27, 2024; Published Online September 02, 2024

<https://dx.doi.org/10.20961/jikap.v8i5.90253>

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan salah satu instrumen penting dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja (Marlinah, 2019). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menguraikan bahwa kompetensi merupakan kemampuan pekerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Definisi tersebut memberikan pandangan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari tenaga kerja. Dengan demikian, kompetensi menjadi faktor kunci dalam penilaian dan pengukuran kualitas tenaga kerja, serta memastikan bahwa para tenaga kerja tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Tenaga kerja yang kompeten juga dapat menjadi langkah penting dalam mencapai kualitas, produktivitas, serta daya saing tenaga kerja yang diinginkan (Hamid et al., 2020).

Persaingan yang semakin ketat, perubahan teknologi yang cepat, dan tuntutan pasar kerja yang dinamis, penting bagi perguruan tinggi untuk mengambil peran yang lebih proaktif dalam membekali mahasiswanya dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar global. Pentingnya peran perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja merupakan hal yang krusial. Penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari berbagai sektor industri.

Slamet (2021) menjelaskan bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur relevansi perguruan tinggi adalah dengan melakukan uji kompetensi. Menurut Wibowo (2018), uji kompetensi adalah sebuah metode untuk mengevaluasi tingkat kesiapan seseorang dalam mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang dijalankan. Uji kompetensi pada hakikatnya merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas seseorang diberbagai sektor industri. Di mana mahasiswa diuji untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Seiring dengan perubahan konstan di dunia kerja, uji kompetensi memainkan peran yang semakin penting. Uji kompetensi dapat membantu memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Uji kompetensi juga memberi manfaat bagi individu yaitu dapat membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana individu tersebut dapat memenuhi tuntutan dan standar yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Uji kompetensi tidak hanya mengukur aspek teknis, seperti pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menggali aspek sikap kerja dan kemampuan beradaptasi individu di lingkungan kerja yang beragam (Slamet, 2021). Dengan demikian, uji kompetensi mengidentifikasi sejauh mana seseorang siap untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja yang serba dinamis.

Pelaksanaan uji kompetensi harus dilakukan oleh sebuah badan independen dan berkompeten. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi profesi melalui proses uji kompetensi. Uji kompetensi dapat dilakukan dengan bantuan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang merupakan lembaga yang berfokus pada sertifikasi kompetensi dalam bidang tertentu. Mengacu dari Peraturan BNSP Nomor 2/BNSP/III/2014

tentang Pembentukan LSP dapat diklasifikasikan menjadi tiga, meliputi LSP pihak ketiga (LSP-P3), LSP pihak kedua (LSP-P2), dan LSP pihak kesatu (LSP-P1). Pelaksanaan uji kompetensi dimulai dengan tahapan persiapan, pelaksanaan uji kompetensi, penilaian dan penerbitan sertifikat uji kompetensi (Setiawan et al., 2018). Dalam setiap tahapan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat untuk memastikan bahwa uji kompetensi berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat serta berguna bagi peserta dan pemangku kepentingan lainnya.

LSP-P1 UNS merupakan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama di UNS. Salah satu skema yang diujikan di LSP-P1 UNS yaitu skema *Junior Administrative Assistant* (JAA). Program studi (Prodi) Pendidikan Administrasi Perkantoran (PAP) merupakan salah satu prodi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret yang memiliki banyak peminat untuk skema JAA. Hal ini disebabkan oleh salah satu *learning outcome* dari prodi PAP yaitu sebagai praktisi perkantoran. Prodi ini telah mendukung mahasiswanya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi uji kompetensi serta memastikan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dukungan tersebut juga tercermin dengan adanya Tempat Uji Kompetensi (TUK) di prodi PAP berupa laboratorium PAP. Dengan adanya uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 UNS ini mahasiswa prodi PAP dapat mengukur dan memverifikasi kompetensi yang dimiliki dalam berbagai aspek penting, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan di dunia kerja. Sejalan dengan pendapat Purnamasari dan Anggraini (2021), bahwa dengan adanya uji kompetensi juga membantu memastikan bahwa individu memiliki kompetensi yang sesuai dalam bidangnya. Oleh karena itu, uji kompetensi menjadi salah satu instrumen yang dapat mengukur sejauh mana kualitas pendidikan dan persiapan mahasiswa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa belum memahami apa itu LSP dan pentingnya mengikuti uji kompetensi (Prasetyo et al., 2023). Selaras dengan studi pendahuluan, diketahui bahwa di prodi PAP FKIP UNS masih terdapat beberapa mahasiswa yang kurang memahami apa itu LSP dan pentingnya uji kompetensi. Hasil studi pendahuluan menemukan permasalahan lain, yaitu kurang optimalnya sarana dan prasarana yang digunakan di TUK laboratorium PAP dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Dalam rangka memahami secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan uji kompetensi di LSP-P1 UNS, khususnya skema JAA di TUK laboratorium PAP, penelitian ini akan mengevaluasi berbagai aspek dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi uji kompetensi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan uji kompetensi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menindaklanjuti kualitas pendidikan dan persiapan lulusan di masa depan. Maka dari itu, peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pelaksanaan Uji Kompetensi Skema *Junior Administrative Assistant* (JAA) di LSP-P1 Universitas Sebelas Maret.”

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. (Time new roman 10)Metode penelitian berisi tentang tahapan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan informasi lain yang berkaitan dengan prosedur penelitian. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang berasal dari pendekatan berpikir induktif, yang didasarkan pada pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan di Universitas Sebelas Maret Surakarta terkhusus kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1) di TUK laboratorium PAP.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dengan interatif yaitu pengumpulan, penyajian, reduksi, dan kesimpulan. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dengan penelusuran data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan informan terkait pelaksanaan uji kompetensi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak LSP melalui perantara ketua LSP dan mahasiswa program studi PAP berupa dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan uji kompetensi.

Narasumber dalam penelitian ini yakni ketua LSP, asesor LSP, kepala program studi PAP, dan mahasiswa program studi PAP. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dengan selektif memilih narasumber yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait keadaan sosial yang diteliti dan *snowball sampling* ialah dengan mencari informan lain guna melengkapi sumber data yang diperlukan. Validitas yang digunakan yakni triangulasi sumber dan

triangulasi teknik, yakni dengan membedakan data yang diperoleh dari hasil wawancara informan utama dengan informan pendukung agar mendapatkan data yang valid serta melakukan observasi untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian

Penelitian ini memiliki fokus khusus pada pelaksanaan kegiatan uji kompetensi di LSP-P1 UNS, khususnya skema JAA di TUK laboratorium PAP. LSP-P1 UNS merupakan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama di UNS. Salah satu skema yang diujikan di LSP-P1 UNS yaitu skema *Junior Administrative Assistant* (JAA). Uji kompetensi ini dapat mengukur dan memverifikasi kompetensi yang dimiliki dalam berbagai aspek penting, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan di dunia kerja.

Pelaksanaan uji kompetensi melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk mengukur dan menilai kemampuan mahasiswa dalam bidangnya. Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, hingga tahap evaluasi. Tahap persiapan uji kompetensi LSP-P1 UNS melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa proses uji kompetensi berjalan lancar dan efektif. Tahap persiapan ini meliputi melakukan sosialisasi, pendaftaran peserta, mengajukan skema ujian, menyiapkan TUK, dan pemilihan asesor.

Pelaksanaan uji kompetensi LSP di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran mengacu pada skema yang telah ada yaitu skema *Junior Administrative Assistant* (JAA). Pelaksanaan uji kompetensi ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu pertama, pra asesmen dimana asesor memverifikasi data peserta dan memberikan arahan terkait uji kompetensi. Kedua, asesmen dimana mahasiswa melaksanakan ujian berupa ujian tertulis, lisan, dan praktik. Ketiga, rekomendasi asesmen dimana asesor akan merekomendasikan apakah peserta dinyatakan kompeten atau belum kompeten.

Evaluasi merupakan proses untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan uji kompetensi LSP dalam mencapai tujuannya. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh proses uji kompetensi, baik instrumen, pelaksanaan maupun monitoring pasca pelaksanaan. Dengan demikian, tahap evaluasi pelaksanaan uji kompetensi LSP FKIP UNS mencerminkan komitmen terhadap standar tinggi dalam mengukur dan mengakui kompetensi individu sesuai dengan kebutuhan profesi pendidikan.

Hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi LSP ini meliputi kurangnya persiapan mahasiswa dan fasilitas yang kurang optimal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sosialisasi yang intensif kepada mahasiswa dan meningkatkan sarana dan prasarana.

Pembahasan

Uji kompetensi merupakan proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk menentukan sejauh mana kompetensi yang telah dicapai oleh peserta didik dari kursus dan lembaga pendidikan nonformal lainnya, serta individu yang belajar secara mandiri dalam jenis dan tingkat pendidikan tertentu (Suharto, 2015). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Rencana kerja pada bab III pasal 14 meliputi, 1) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada lulusan yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang telah dirancang dan dikembangkan. Hal ini mencakup beberapa aspek, seperti penyusunan perangkat asesmen dan uji kompetensi, penyediaan asesor (tenaga penguji), pelaksanaan sertifikasi, dan pemantauan pemeliharaan sertifikasi. Selain itu, LSP juga bertanggung jawab untuk memastikan kelangsungan administrasi uji kompetensi, termasuk verifikasi fasilitas dan peralatan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) (Setiawan et al., 2018).

Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi LSP meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, hingga tahap evaluasi. *Pertama*, tahap persiapan adalah tahap krusial yang harus dilakukan sebelum melaksanakan uji kompetensi LSP. Dengan persiapan yang matang, keberhasilan pelaksanaan uji kompetensi dapat dipastikan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2018) yang mengemukakan bahwa dengan persiapan yang matang, akan memastikan keberhasilan dalam pelaksanaan uji kompetensi LSP. Persiapan dalam uji kompetensi dimulai dari rapat koordinasi seluruh pengurus ujian LSP, menentukan asesor dengan berkoordinasi dengan pihak LSP lain, penggandaan dokumen bagi peserta ujian dan Materi Uji Kompetensi (MUK), dan verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Tahap persiapan meliputi (1) melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan karena masih banyak mahasiswa yang tidak mengerti pentingnya sertifikasi kompetensi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Prasetyo et al., 2023) bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum memahami apa itu LSP dan mengapa penting untuk mengikuti uji kompetensi. Melalui sosialisasi, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya uji kompetensi dalam menunjang karier mereka. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih siap dan termotivasi untuk mengikuti uji kompetensi tersebut. (2) melaksanakan rapat, dilakukan oleh pengelola LSP. Tujuan rapat adalah untuk merumuskan rencana kerja dan strategi pelaksanaan uji kompetensi. Serta diputuskan jadwal pelaksanaan uji kompetensi, pembahasan mengenai skema uji kompetensi, alokasi sumber daya (TUK dan asesor), evaluasi dan tindak lanjut terhadap uji kompetensi sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 305 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi, langkah-langkah pelaksanaannya mencakup pendaftaran calon peserta uji kompetensi dengan melengkapi syarat-syarat yang berlaku. Untuk mengikuti uji kompetensi LSP calon asesi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. (a) Kartu Tanda Penduduk (KTP), (b) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), (c) Pasfoto 3x4 (Background Merah) (d) Transkrip nilai/KHS sudah bertandatangan pembimbing akademik/kaprodi/dekan semester 1-5 bagi mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Administrasi Negara dan D3 Manajemen Administrasi, (e) Sertifikat magang dunia usaha/dunia industri minimal 1 bulan (di luar UNS).

Selanjutnya yaitu verifikasi TUK harus dilakukan pemeriksaan secara cermat untuk memverifikasi kelayakannya, termasuk penilaian terhadap fasilitas, peralatan dan kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaan uji kompetensi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa TUK memenuhi standar yang ditetapkan dan dapat mendukung pelaksanaan uji kompetensi dengan baik. Terdapat ketentuan-ketentuan TUK yang akan digunakan sesuai dengan Peraturan BNSP Nomor 206 Tahun 2014 yaitu (a) Memiliki Bentuk Organisasi (Surat Keputusan/Badan Hukum/Akta Notaris), (b) Mempunyai Uraian Tugas dan Tanggung Jawab masing masing Pengurus, (c) Mempunyai Bukti Kepemilikan Kantor (Akta Notaris/SHM/Sewa), (d) Mempunyai Izin/domisili Usaha (minimal 2 tahun), (e) Mempunyai Rencana Kerja, (f) Memiliki Perangkat kerja, (g) Menetapkan dan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan pedoman BNSP Nomor 206 Tahun 2014, (h) TUK harus memiliki peralatan uji sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan teknis. Setelah TUK dinyatakan layak dan sesuai dengan skema maka verifikasi akan mengeluarkan Surat Keterangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Pemilihan skema uji kompetensi yang akan dijalankan adalah tahapan yang krusial. Skema ini mencakup jenis-jenis tes atau asesmen yang akan dilakukan dalam uji kompetensi, termasuk format, bobot, waktu, dan kriteria penilaian. Tahap ini melibatkan penyusunan skema uji kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selaras dengan pernyataan (Setiawan et al., 2018), soal-soal yang digunakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan uji kompetensi. Pembuatan soal ujian LSP dibuat berdasarkan pada skema yang ditentukan. Proses ini menjamin bahwa uji kompetensi ini dapat mengevaluasi dengan akurat kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pada rapat ini juga membahas terkait asesor yang dipilih. Pemilihan asesor didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki. Asesor harus memiliki sertifikasi yang sesuai dan memahami dengan baik skema yang akan dijalankan. Asesor harus memiliki keahlian di bidang yang relevan serta pengalaman praktis yang cukup untuk melakukan penilaian secara objektif dan menyeluruh. Selaras dengan hasil penelitian (Setiawan et al., 2018) bahwa, pemilihan asesor/penguji sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Buku Pedoman BNSP Nomor 204 Tahun 2007 adalah sebagai berikut. (a) Pendidikan minimal D1 dan sederajat dengan pengalaman kerja yang terkait dengan profesi selama 1 tahun, (b) Memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi LSP, (c) Memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi

TUK dan LSP cabang, (d) Mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan, (e) Harus mengikuti dan lulus pelatihan asesor lisensi. Kredibilitas dan integritas asesor juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pemilihan ini, memastikan bahwa mereka mampu memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak. Asesor yang telah mengajukan permohonan untuk sertifikasi kompetensi dan memenuhi syarat akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai asesor (Farikhatir et al., 2018). Melalui proses seleksi yang ketat, LSP FKIP UNS memastikan bahwa asesor yang terlibat adalah individu-individu yang kompeten dan berkomitmen untuk menjaga standar kualitas dalam setiap tahap uji kompetensi.

Kedua, tahap pelaksanaan uji kompetensi LSP di program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran mengacu pada skema yang telah ada yaitu skema *Junior Administrative Assistant* (JAA). Pelaksanaan uji kompetensi ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu pra asesmen, asesmen, dan rekomendasi asesmen. (1) pra asesmen uji kompetensi merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan kesiapan peserta sebelum menghadapi uji kompetensi yang sesungguhnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Prasetyo et al., 2023) dikemukakan bahwa setelah pihak LSP melakukan validasi, selanjutnya dilakukan pra asesmen pada calon asesi. Di mana tahap pra asesmen ini dilaksanakan oleh asesor kompetensi yaitu melakukan verifikasi mulai dari FR APL 01, FR APL 02, bukti pendukung, dan menjelaskan serta merencanakan dan melakukan pengorganisasian asesmen dengan formulir MMA. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam dokumen, peserta akan diberi waktu untuk melengkapi atau memperbaiki berkas mereka. (2) asesmen uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah inti dari proses sertifikasi, di mana peserta diuji berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Asesmen dapat mencakup berbagai metode, seperti tes tulis, wawancara, demonstrasi praktik, studi kasus, atau portofolio, tergantung pada jenis kompetensi yang diuji. Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya uji kompetensi, yaitu sebagai bentuk penilaian baik secara teknis maupun non-teknis, untuk menentukan kompetensi seseorang dalam kualifikasi atau unit kompetensi tertentu (Setiawati & Ndawu, 2020). Dalam pengukuran ini, siswa dianggap kompeten jika lulus dalam ujian tersebut (Purnamasari & Anggraini, 2021). (3) rekomendasi asesmen, setelah asesmen selesai, asesor mengumpulkan dan meninjau semua data hasil ujian, termasuk skor tes tulis, hasil wawancara, demonstrasi praktik, dan komponen asesmen lainnya. Berdasarkan analisis menyeluruh ini, asesor menentukan apakah peserta telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Rekomendasi asesmen kemudian dirumuskan dan dikomunikasikan kepada peserta dalam bentuk laporan resmi. Hal ini dijelaskan juga oleh (Prasetyo et al., 2023) bahwa, setelah ujian selesai dan asesor menyatakan keputusan apakah asesi kompeten atau belum kompeten dan diserahkan kembali ke bagian sertifikasi. Kemudian asesi menunggu untuk terbitnya sertifikat dari LSP.

Ketiga, tahap evaluasi dalam uji kompetensi LSP merupakan tahap dalam menentukan sejauh mana peserta ujian memenuhi standar yang telah ditetapkan (Setiawan et al., 2018). Pada tahap ini LSP akan mengadakan forum/rapat pleno untuk membahas hasil penilaian yang telah dilakukan oleh para asesor. Dalam pengukuran ini, siswa dianggap kompeten jika lulus dalam ujian tersebut (Purnamasari & Anggraini, 2021). Hal ini diperkuat oleh pendapat (Slamet, 2021) dalam rapat pleno dibahas beberapa hal diantaranya: (a) penyampaian tinjauan proses asesmen oleh asesor; (b) kendala-kendala yang terjadi dan solusinya; (c) pelaporan hasil uji dari masing-masing ketua TUK; (d) keputusan kompetensi asesi oleh ketua LSP. Dengan demikian pengawasan LSP sudah sesuai dengan fungsi pengawasan di atas.

Hambatan yang dialami yang dialami dalam pelaksanaan uji kompetensi LSP FKIP UNS yaitu kurangnya persiapan mahasiswa dan fasilitas yang kurang optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut perlu dilakukan upaya seperti, sosialisasi yang intensif kepada mahasiswa dan meningkatkan sarana dan prasarana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan analisis data yang telah dilaksanakan mengenai pelaksanaan uji kompetensi di LSP-P1 UNS, khususnya skema JAA di TUK laboratorium PAP, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 sudah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 memiliki tujuan untuk memastikan kesiapan dan kompetensi mahasiswa serta memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran di program studi tersebut. Kegiatan ini mendukung pencapaian profil PAP yaitu sebagai tenaga profesional di bidang administrasi perkantoran. Pelaksanaan

uji kompetensi LSP meliputi tahap persiapan, pelaksanaan asesmen, dan evaluasi. Tahap persiapan ini meliputi melakukan sosialisasi, pendaftaran peserta, menyiapkan skema ujian, menyiapkan TUK, dan pemilihan asesor. Pelaksanaan uji kompetensi ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu pertama, pra asesmen dimana asesor memverifikasi data peserta dan memberikan arahan terkait uji kompetensi. Kedua, asesmen dimana mahasiswa melaksanakan ujian berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, dan praktik. Ketiga, rekomendasi asesmen dimana asesor akan merekomendasikan apakah peserta dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Tahap evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh proses uji kompetensi, baik instrumen, pelaksanaan maupun monitoring pasca pelaksanaan. Dengan demikian, tahap evaluasi pelaksanaan uji kompetensi di LSP-P1 UNS mencerminkan komitmen terhadap standar tinggi dalam mengukur dan mengakui kompetensi individu sesuai dengan kebutuhan profesi pendidikan. Hambatan dalam pelaksanaan uji kompetensi skema JAA di LSP-P1 ini meliputi kurangnya persiapan mahasiswa dan fasilitas yang kurang optimal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sosialisasi yang intensi kepada mahasiswa dan meningkatkan sarana dan prasarana.

Daftar Pustaka

- Farikhatir, R. N., Rifqie, M. R., & Soekopitojo, S. (2018). Sertifikasi asesor kompetensi guru produktif program keahlian tata boga dalam pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(6), 708–714. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>
- Hamid, A., Martondi, A., Bahri, S., Hakim, L., Musyaffa, N., & Sastra, R. (2020). Sistem informasi pendaftaran uji kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi pertanian organik Jakarta. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 20(1).
- Marlinah, L. (2019). Pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang berjiwa inovator dan technopreneur menyongsong era society 5.0. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 2(3).
- Prasetyo, A., Prastyana, B. R., Putra, V. F. E., & Adytya, D. P. (2023). Pengelolaan lembaga sertifikasi profesi (LSP-P1) dalam menyiapkan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 59–72. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i1.177>
- Purnamasari, E. D., & Anggraini, L. D. (2021). Pelatihan uji kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola administrasi perkantoran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 59–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36257/apts.vxix>
- Setiarini, Y. F., & Ndawu, M.T. D. (2020). Pengukuran kompetensi peserta didik melalui uji kompetensi tata busana pada TUK gammatika Boyolali, Jawa Tengah. *Abdimas Akademika*, 1(01), 16–28. <http://smamda.net/penilaian-hasil-belajar/September>
- Setiawan, A., Widiyanti, & Sunomo. (2018a). Studi pengelolaan uji kompetensi keahlian berlisensi lembaga sertifikasi profesi pada jurusan teknik mesin di SMKN 1 Blitar. *Jurnal Teknik Dan Pembelajaran*, 1(1), 1–7. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp>
- Setiawan, A., Widiyanti, & Sunomo. (2018b). Studi pengelolaan uji kompetensikeahlian berlisensi lembaga sertifikasi profesi pada jurusan teknik mesin di SMKN 1 Blitar. *JURNAL TEKNIK MESIN DAN PEMBELAJARAN*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/http://journal2.um.ac.id/index.php/jtmp>
- Slamet, M. (2021). Manajemen uji kompetensi lembaga sertifikasi profesi (LSP) SMK Negeri 1 Kebumen. 4(2), 203–213. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp>
- Suharto. (2015). Evaluasi pelaksanaan kegiatan uji sertifikasi kompetensi keahlian administrasi perkantoran. *Seminar Nasional PAP “Pengembangan Ilmu Dan Profesi Administrasi Perkantoran: Peluang Dan Tantangan,”* 39. www.snpp.fkip.uns.ac.id